

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya laju pertumbuhan populasi masyarakat perkotaan dapat menimbulkan masalah lingkungan, dilihat dari konversi lahan hingga penurunan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh sampah dan polusi. Keadaan populasi di perkotaan yang semakin tinggi dan lebih besar dari laju produksi bahan pangan nabatinya termasuk ancaman krisis pangan. Bahan pangan nabati seperti sayuran yang tidak mencukupi kebutuhan penduduk suatu daerah perkotaan secara tidak langsung berdampak pada ketergantungan pada wilayah lain. Terutama untuk wilayah perkotaan di negara-negara berkembang, sejauh ini wilayah tersebut sudah menjadi pusat penduduk. Pemukiman yang ditempati oleh banyak penduduk perkotaan biasanya terdapat kumpulan orang-orang dengan etnik yang beragam.

Perkembangan fisik di Kota Yogyakarta mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang sangat pesat. Hal ini berdampak buruk terhadap keberadaan lahan pertanian di perkotaan. Secara spasial, transformasinya bersifat tersebar, acak, dan tidak memiliki pola spasial yang teratur. Semakin dekat dengan pusat kota, semakin tinggi tingkat konversi lahan pertanian. Dengan kata lain, model kelangsungan hidup lahan pertanian semakin lemah (Muta'ali, 2004). Menurut (Yunus, 2002), perkembangan daerah perkotaan ditandai dengan peningkatan kebutuhan lahan yang semakin besar, yang membawa konsekuensi pada tingginya angka konversi lahan pertanian. Seiring dengan meningkatnya intensitas

pembangunan, terdapat tekanan yang lebih besar pada mata pencaharian petani di lahan pertanian perkotaan.

Dominasi pemanfaatan lahan di kawasan perkotaan yang bersifat non agraris membuat lahan untuk kegiatan pertanian semakin menurun atau bisa dikatakan terdegradasi. Sejauh ini akibat dari banyaknya lahan yang diperuntukkan sebagai pemukiman dan industri. Penduduk di kawasan perkotaan semakin meningkat, hal ini terjadi terutama karena urbanisasi yang bertambah setiap tahunnya. Urbanisasi sebagai perubahan atau pergeseran kehidupan yang di dalamnya mencakup manusia, ruang, dan kegiatan. Sejalan dengan hal tersebut, maka yang dimaksud adalah urbanisasi spasial sehingga perubahan atau pergeserannya dari spasial ini mencirikan bahwa aspek kehidupan pedesaan yang kemudian mengarah pada ciri-ciri kehidupan masyarakat perkotaan (Selang, et al., 2018). Urbanisasi Perkotaan di Kota Yogyakarta telah memasuki tahap sub-urbanisasi dengan konversi lahan pertanian sawah produktif menjadi kawasan terbangun di daerah pinggiran kota. Faktanya hal tersebut berdampak pada produksi pangan nabati dan penataan ruang yang dinilai kontra produktif.

Peningkatan penduduk perkotaan secara langsung berdampak pada meningkatnya kebutuhan pangan nabati di daerah perkotaan. Faktanya selama ini hampir seluruhnya kebutuhan sayuran tersebut diimpor dari luar daerah perkotaan. Akibatnya terjadi kondisi dimana kebanyakan harga sayuran di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi dan terkadang sulit didapat. Parahnya sering berdampak buruk bagi kesehatan akibat diberi zat

pengawet untuk mempertahankan kesegarannya. Meskipun demikian, sebagian daerah perkotaan masih memiliki potensi pertanian yang dapat dikembangkan lagi untuk memenuhi kebutuhan pangan nabatinya. Pemenuhan kebutuhan pangan nabati merupakan aspek positif bagi keberlanjutan suatu daerah perkotaan. Mempromosikan swasembada pangan nabati dan mempunyai siklus makanan tertutup merupakan salah satu ciri suatu daerah perkotaan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, maka daerah perkotaan berkelanjutan harus mampu menyediakan kebutuhan sayuran bagi masyarakatnya secara mandiri. Tidak sedikit potensi pengembangan pertanian di perkotaan yang harus berhadapan dengan pengembangan kawasan perumahan atau industri yang semakin ekstensif. Alih fungsi lahan pertanian merupakan sebuah ancaman yang cukup serius bagi ketahanan, kemandirian pangan nabati, dan juga keberlanjutan dari pertanian perkotaan (*urban farming*) itu sendiri.

Pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan terdorong untuk mulai mencoba memenuhi kebutuhan pangan nabati sendiri dan memperbaiki kondisi lingkungan. Solusinya adalah dengan menerapkan pertanian perkotaan. Pertanian perkotaan sendiri merupakan usaha masyarakat perkotaan untuk menumbuhkan, memelihara dan mendistribusikan pangan nabati serta produk lainnya melalui budidaya tanaman yang intensif di wilayah perkotaan dan daerah sekitarnya, dan menggunakan kembali sumber daya alam dan limbah untuk memperoleh keragaman hasil panen (Musthofa & Izzuddin, 2019). Pertanian perkotaan di negara berkembang memiliki banyak karakteristik, seperti upaya

mendukung ketahanan pangan nabati perkotaan, sehingga pelaksanaan pertanian perkotaan seringkali bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga (Orsini, et al., 2013). Adopsi pertanian perkotaan di daerah perkotaan telah menghasilkan berbagai hasil dan strategi. Selama ini terus dihadapi masalah pasokan pangan, terbukti dari pentingnya pendapatan daerah dan kondisi kemiskinan. Gabin dalam penelitian (Korbeogo, 2017) menyatakan bahwa pertanian perkotaan merupakan sumber pendapatan penting bagi individu maupun kelompok. Sebagai hak asasi manusia, kebutuhan dasar dan pangan tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan. Salah satu strategi untuk mengatasi masalah pangan adalah dengan memberdayakan masyarakat untuk mencapai ketahanan pangan nabati berbasis kearifan lokal dan diversifikasi pangan nabati. Penggunaan pekarangan dapat menjadi bagian dari strategi ini. Tentu saja, peran serta kelompok masyarakat juga harus berperan penting dalam mendorong pembangunan pertanian. Dalam hal ini, perlu penguatan sistem pertanian dan perluasan pendidikan dan pelatihan pertanian untuk meningkatkan kualitas individu petani dan menciptakan sistem yang memberikan peluang khususnya bagi masyarakat perkotaan.

Organisasi yang membidangi atas kegiatan pertanian di Kota Yogyakarta terdiri dari kelompok tani, gapoktan, dan asosiasi. Data kelembagaan petani Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Kelembagaan Petani Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Kelompok	Bidang Usaha		
			Pertanian	Peternakan	Perikanan
1	Gedongtengen	9	9	0	0
2	Jetis	10	9	0	1

3	Umbulharjo	17	12	0	5
4	Kotagede	23	19	3	1
5	Tegalrejo	19	18	1	0
6	Kraton	7	7	0	0
7	Wirobrajan	6	6	0	0
8	Gondokusuman	13	13	0	0
9	Danurejan	24	20	2	2
10	Ngampilan	13	13	0	0
11	Mantrijeron	5	4	0	1
12	Mergangsan	11	10	0	1
13	Pakualaman	6	5	0	1
14	Gondomanan	14	9	5	0
	Jumlah/Total	177	154	11	12

Sumber : Data Base Kelompok Tani Tahun 2020 (BPP, 2020)

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) tersebar di seluruh kelurahan, dengan jumlah keseluruhan 45 gapoktan di Kota Yogyakarta. Sedangkan asosiasi di Kota Yogyakarta adalah di antaranya seperti Asosiasi Anggrek, Asosiasi Petani Sayur (Sepur Kota), dan Asosiasi Tabulampot. Di antara banyak tantangan yang dihadapi industri pertanian, petani perlu diberdayakan dan mampu memecahkan masalah yang muncul di usaha pertaniannya. Peran pemerintah dan tokoh masyarakat harus mendorong petani untuk merasakan pentingnya bergabung dengan kelompok tani. Salah satu dari alasan mengapa petani bergabung dengan kelompok tani adalah karena pengelolaan kegiatan pertanian yang lebih baik, pengumpulan dan distribusi informasi kepada anggota, dan distribusi input serta produksi dan pengembangan modal. Peningkatan kinerja kelompok tani tidak hanya disebabkan oleh kepekaan anggota kelompok tani, tetapi juga karena adanya dukungan dari kepala desa dan peran dari tokoh masyarakat lainnya.

Pembentukan kelompok tani telah menjadi program pemerintah sejak awal pembangunan pertanian pada tahun 1970-an. Pada tahun 2014, organisasi petani sebagian besar berbentuk asosiasi. Dukungan utamanya

dapat berupa forum interaksi vertikal antara pemerintah dengan petani dan interaksi horizontal antara petani dengan petani, sekaligus menjadi alat distribusi. Ada dua pandangan utama yang cukup kontradiktif mengenai peran kelompok tani. Bagi pemerintah, kelompok tani tidak lebih dari sebuah strategi untuk mendorong pembangunan, terutama untuk memfasilitasi fungsi komunikasi, dan untuk merampingkan manajemen proyek. Sementara itu, kelompok tani dalam masyarakat lebih berdaya peduli dengan pelaksanaan fungsi ekonomi (Syahyuti, et al., 2014). Kelompok tani dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota dan keluarganya. Dengan berpartisipasi dalam organisasi, petani dapat berperan dalam meningkatkan hasil pertanian, meningkatkan taraf hidup petani, mengentaskan kemiskinan, memperbaiki degradasi sumber daya alam, meningkatkan partisipasi perempuan, kesehatan, dan pendidikan (Nugroho, et al., 2018).

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 menetapkan fungsi kelompok tani sebagai ruang kelas, sarana kerja sama, dan unit produksi. Kelompok Tani merupakan wadah pendidikan dan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap petani untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kehidupan yang lebih baik. Asosiasi ini juga sebagai media kerja sama yang baik antara sesama petani dan kelompok, serta dengan pemangku kepentingan lainnya sebagai sarana kerja sama. Harapannya kemitraan ini akan membuat pertanian lebih efisien dan menguntungkan dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Kegiatan pertanian dari asosiasi dapat

membuka pintu bagi pasokan alat-alat produksi dan peningkatan penjualan produk panen yang dihasilkan, sekaligus mengurangi biaya pembelian unit peralatan. Kegiatan pertanian oleh anggota asosiasi harus dilihat sebagai unit usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi dengan menjaga kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Keanggotaan kelompok berpengaruh positif terhadap produktivitas dan pendapatan bersih usahatani maupun keluarga. Hal ini menegaskan bahwa asosiasi memberikan dampak positif bagi anggotanya dengan meningkatkan pendapatan petani.

B. Rumusan Masalah

Pada awalnya hanya terdapat kelompok tani yang melakukan kegiatan pertanian perkotaan di Kota Yogyakarta. Kemudian masyarakat mulai membentuk asosiasi sebagai upaya meningkatkan usaha agribisnis di wilayah Kota Yogyakarta. Sejalan dengan itu, asosiasi perlu digiatkan lagi terhadap pengelolaannya. Pengelolaan suatu organisasi menjadi penting untuk mencapai tujuan kelompok yang lebih baik.

Asosiasi di Kota Yogyakarta merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh masyarakat untuk mewadahi suatu tujuan, keinginan, dan minat yang sama. Hal tersebut penting untuk diketahui bagaimana pengelolaannya karena mereka dibentuk dari masyarakat dan bukan dari pemerintah. Terbentuk secara *bottom up* justru dinilai lebih baik karena sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat lebih leluasa dalam mengelola asosiasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan pekarangan perkotaan di Kota Yogyakarta. Asosiasi terus

berkembang dan bermanfaat bagi anggotanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa adanya asosiasi ini dari yang belum ada menjadi ada, dari ada menjadi lebih berkembang.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraian di atas, maka peneliti menyusun beberapa rumusan masalah yang perlu dikaji lebih dalam mengenai deskripsi pemanfaatan pekarangan perkotaan di Kota Yogyakarta dan bagaimana pengelolaan asosiasi dalam pemanfaatan pekarangan perkotaan di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan pemanfaatan pekarangan perkotaan di Kota Yogyakarta.
2. Mengetahui pengelolaan asosiasi dalam pemanfaatan pekarangan perkotaan di Kota Yogyakarta.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi asosiasi dan masyarakat di lokasi penelitian. Adapun manfaat tersebut antara lain :

1. Bagi asosiasi, diharapkan menjadi bahan pertimbangan pengelolaan asosiasi sebagai upaya pelaksanaan pemanfaatan pekarangan perkotaan di Kota Yogyakarta.
2. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dalam pelaksanaan pemanfaatan pekarangan perkotaan di Kota Yogyakarta.